

**SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SURABAYA : SEBUAH TINJAUAN TEORITIS**

Edyta Dwi Setyowati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
edytads99@gmail.com

Putri Wulandari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
putriwulandari0797@gmail.com

Arnaldo Yantino

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
arnaldoyantino@gmail.com

Maulidah Narastri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
maulidah@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This article aimed to present the implementation of the local government accounting system and the performance accountability of government agencies. This article specifically discussed the implementation of the Surabaya city government. The method used literature review, so the authors review or review precious studies through literature sources in the form of international and national journals. The results showed that the local government accounting system with performance accountability in Surabaya city government agencies had an effect on financial reports.

Keywords: *Government accounting system, accountability, performance of government agencies*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengemukakan implementasi dari sistem akuntansi pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artikel ini khusus membahas penerapan pada pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode *literature review*, sehingga penulis mengkaji atau meninjau penelitian-penelitian sebelumnya melalui sumber literatur berupa jurnal Internasional maupun jurnal Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara sistem akuntansi pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kota Surabaya berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Kata kunci: **Sistem Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas. Kinerja Instansi Pemerintah**

PENDAHULUAN

Sistem akuntansi pada tingkat pusat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat, sedangkan pada tingkat daerah diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah didukung dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Ten-tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 232 yang mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengharuskan pemerintah mengacu pada SAP berbasis akrual dalam membuat sistem akuntansi pemerintah. Penerapan basis Akrual dalam akuntansi pemerintahan daerah menuntut adanya integrasi informasi yang cepat mengenai kondisi keuangan entitas pemerintah. Penerapan Teknologi Informasi akan mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia terutama dalam pengembangan sistem akuntansi.

Perpindahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi kearah sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan (Wulandari, 2009). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat berdampak pada pentingnya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Hal ini sangat perlu diterapkan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik (Soetjipto dan Sudikdiono, 211: 15 dalam Fitriadi 2013).

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang tidak baik dan korup menuju tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantarno dan Azlina, 2011). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah mereka lakukan kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009).

Dewasa ini, semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara menyebabkan seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah menyusun perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja dan memberikan laporan kepada publik. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memunyai kinerja yang fokus pada kepentingan masyarakat dan mendorong

pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungannya, dengan berikhtiar memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan berkualitas. Selain itu, organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah dituntut untuk memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Tuntutan yang semakin kuat tersebut diajukan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap penyelenggara Negara yang diamanatkan kepada mereka.

Pencapaian keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah didukung oleh kinerja pemerintah yang dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan (Lazyra,2016). Isu mengenai kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi perhatian berbagai organisasi, apalagi yang menyangkut isu upaya untuk mendorong organisasi pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif dengan menghilangkan streatip yang telah lama melekat di instansi pemerintah, yaitu sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi menjadi faktor utama pengadopsian sistem pengukuran kinerja pada instansi pemerintah (Mardiasmo, 2004). Di Indonesia sendiri sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999. Inpres tersebut mengisyaratkan untuk diterapkannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya dan konsisten. Semakin cepat dan akurat informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah, akan memberikan dampak yang positif bagi instansi.

Penerapan sistem elektronik dan transparan dalam mengelola keuangan membuat Pemerintah Kota Surabaya kembali meraih penghargaan / predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun anggaran 2016. Menurut Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana penghargaan ini dilandasi kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen atau *stakeholder* pemerintah kota dalam meningkatkan serta mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi yang diperoleh Pemerintah Kota Surabaya berupa pemberian opini WTP delapan kali berturut – turut oleh BPK inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin meneliti apakah faktor – faktor yang berperan penting dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Surabaya sehingga meraih opini WTP tujuh kali berturut – turut. Apabila sistem akuntansi pemerintah daerah yang digunakan berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas, pastinya akan dijadikan percontohan bagi daerah lain agar akuntabilitas kinerja instansi menjadi lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mendefinisikan SAPD sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan. Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dijelaskan bahwa SAPD memuat pilihan atas prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Halim dan Kusufi (2012) mengatakan bahwa SAPD secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: Prosedur akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi pengeluaran kas, Prosedur akuntansi selain kas, Prosedur akuntansi asset.

Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah

Kamus Besar Akuntansi (2000:7) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab individu atau bagian/ departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas bisa diterapkan atau diformulasikan melalui aturan hukum atau perjanjian tertentu. Mardiasmo (2000) mengartikan akuntabilitas sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dan masyarakat beserta penggunaannya. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa salah satu peranan pelaporan keuangan adalah untuk kepentingan akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terkait pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada entitas pelaporan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya memastikan bahwa kebijakan sudah diterapkan sebagaimana mestinya tetapi organisasi publik harus mampu memberikan jawaban atau respon kepada pemangku kepentingan atas tindakan yang telah dilakukan (Peters, 2014).

Komite Keuangan Tingkat Tinggi Malaysia tentang Tata Kelola Perusahaan (Komite Keuangan, 1999, hlm. 52) mendefinisikan istilah sebagai:

“... Tata kelola perusahaan adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan-perusahaan menuju peningkatan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan akhir mewujudkan nilai

pemegang saham jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya... ”.

Setiap warga negara di seluruh dunia telah dituntut untuk akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah mereka (Bracci dan Llewellyn, 2012; Bovens, 2007; Kolk, 2011). Bovens (2007) telah membedakan lima dimensi yang berbeda akuntabilitas seperti transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab dan daya tanggap. Dia juga menyatakannya dalam hal ini lima dimensi masing-masing ikon memiliki konsep payung sendiri-sendiri. Ada argumen dimana Mo (2001) menyatakan bahwa privatisasi meningkatkan derajat akuntabilitas publik. Namun, ada juga argumen, di mana privatisasi akan menurunkan derajat akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Mo (2001) melakukan penelitian ini untuk menyelidiki masalah ini.

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

LAN (2003:3) menyebutkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan atau kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang bagi suatu proses yang berkelanjutan. Mardiasmo (2005:125) juga menambahkan bahwasanya untuk melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan indikator kinerja yang kemudian akan dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. LAN (2003:13) Mendefinisikan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja terdiri dari kinerja keuangan dan non-keuangan. Penilaian kinerja keuangan daerah menggunakan indikator keuangan berdasarkan tingkat pencapaian hasil kerja yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mengelola keuangan suatu daerah (Pramita, 2015).

Pengukuran kinerja adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan / atau melaporkan informasi mengenai kinerja individu, kelompok, organisasi, sistem atau komponen (Upadhaya et al., 2014). Kinerja harus mewakili pendirian politik tertentu; ia harus melibatkan audiens yang menjadi target khususnya; ia harus memenuhi aturan formal, ritual, dan konvensi lembaga yang melaluinya makna diproyeksikan; dan diterima sebagai logis dan koheren (Rai, 2015). Batasan dapat diubah menjadi sumber daya yang menguntungkan kinerja pemimpin (Helms, 2017). Menurut Antoniades dan Haan (2018), kinerja politik adalah tingkat kepuasan dan loyalitas pemilih-warga negara, dan reputasi seorang politisi.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Literatur Review. Literatur Review (*literature review*) menurut Cooper (2010) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*) serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Sedangkan Literatur Review menurut Snyder (2019) adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa *overview* para ahli yang tertulis dalam teks. Snyder (2019) menyimpulkan bahwa *literature review* memiliki peran sebagai landasan bagi berbagai jenis penelitian karena hasil *literature review* memberikan pemahaman tentang perkembangan pengetahuan, sumber stimulus pembuatan kebijakan, memantik penciptaan ide baru dan berguna sebagai panduan untuk penelitian bidang tertentu.

Dalam literatur review yang dipakai oleh para penulis, referensi berasal dari: pertama adalah Jurnal Nasional terbitan tahun 2013-2020; Kedua adalah jurnal Internasional dari tahun 2014-2019; Ketiga adalah situs resmi pemerintah yaitu Kemenkeu Learning Center; Keempat adalah buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik Edisi 4 yang ditulis oleh Mardiasmo pada tahun 2009. Penulis mengolah referensi yang didapat menjadi artikel yang bersifat ilmiah.

PEMBAHASAN

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Susanto (2009) Sistem Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan dibidang keuangan. Pengertian sistem akuntansi juga dikemukakan oleh Reeve (2009:223) yang menjelaskan bahwa sistem akuntansi (*accounting system*) adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap *good governance* pada pemerintah daerah (Njeru,2000). Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan, agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan dan adanya kesamaan persepsi serta pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:167).

Akuntabilitas

Menurut Mashaw (2006) Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggungjawab mereka dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggungjawab. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala. Akuntabilitas menurut Endahwati (2014) merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dalam tata kelola organisasi yang menggambarkan sebuah bentuk pertanggungjawaban kepentingan yang wajib untuk diberitahukan dan dilaporkan atas kinerja terhadap tiap-tiap tindakan. Akuntabilitas menyangkut hubungan saat ini ataupun di masa depan baik antar individu dan kelompok untuk dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan sanksi jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang.

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Supriyono (2009) Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal, baik yang menyangkut fiskal, manajerial maupun program. Yang & Northcott (2018) mengatakan bahwa akuntabilitas digunakan sebagai

mekanisme oleh pejabat publik untuk memastikan dan menjelaskan bahwa mereka telah berperilaku etis, bertindak sesuai aturan, dan bertanggungjawab atas tindakan dan perilaku tersebut.

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 pemerintah telah mengesahkan peraturan baru mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pewujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya merupakan bentuk pertanggungjawaban Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu contoh komponen laporan keuangan Kota Surabaya yang disusun dan disajikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2013 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi untuk pembiayaan berdasarkan

penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Laporan realisasi anggaran Kota Surabaya juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembanding dengan tahun sekarang.

Fungsi Akuntabilitas Bagi Pemerintah

Akuntabilitas Publik menurut Bowen memiliki 3 fungsi yaitu: (1) Sebagai Alat Kontrol Demokrasi, akan berfungsi apabila masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel atau diharapkan akan akuntabel, masyarakat dapat menilai akuntabilitas seseorang dari rekam jejaknya (*tape record*) ataupun dari program yang dijanjikan dan sebagai konsekuensinya tentunya pejabat publik atau calon pejabat publik akan berusaha menunjukkan akuntabilitasnya; (2) Sebagai Alat Pencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan, istilah yang mengatakan “*power tend to corrupt*” atau kekuasaan cenderung untuk korupsi perlu dicegah sebelum terjadi, pegawai atau pejabat negara yang menguasai sumber daya atau kewenangan bisa cenderung untuk melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangannya, kesadaran akan kondisi inilah yang mendorong perlu akuntabilitas publik, perlu didukung oleh pengendalian internal dan mekanisme yang jelas seperti pertanggungjawaban keuangan negara serta kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan; (3) Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas, dalam istilah “*do the right thing*” atau mengerjakan hal yang benar, PNS, kelompok, atau instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) untuk meningkatkan efisiensi operasi, sedangkan dalam istilah “*doing the right thing*” pada instansi publik yang akuntabel adalah yang bisa melayani publik dengan memuaskan dan dapat dilakukan dengan peningkatan efektifitas kegiatan yang dapat memberikan pertambahan nilai (*value added*) terhadap pelayanan publik, instansi publik perlu mengetahui kebutuhan publik dengan melakukan analisis kebutuhan publik itu sendiri, setelah kebutuhan publik diidentifikasi selanjutnya dilakukan perancangan terhadap kebutuhan publik dan untuk merealisasikannya perlu dilakukan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa: A) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah yang

berpengaruh terhadap *good governance* pada pemerintah daerah dengan tujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan dan adanya kesamaan persepsi serta pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan; B) Akuntabilitas merupakan merupakan istilah yang terkait dalam tata kelola organisasi yang menggambarkan sebuah bentuk pertanggungjawaban kepentingan yang wajib untuk diberitahukan dan dilaporkan atas kinerja terhadap tiap-tiap tindakan yang menyangkut hubungan saat ini ataupun di masa depan baik antar individu dan kelompok untuk dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan sanksi jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang; C) Fungsi Akuntabilitas Bagi Pemerintah yaitu : (1) Sebagai alat kontrol demokrasi; (2) Sebagai Alat Pencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan; dan (3) Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya merupakan bentuk pertanggungjawaban Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana salah satu contoh komponen laporan keuangan Kota Surabaya yang disusun dan disajikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2013 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran Kota Surabaya juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembandingan dengan tahun sekarang.

Dengan demikian berarti antara sistem akuntansi pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kota Surabaya berpengaruh terhadap laporan keuangan, dimana seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode disusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu LKPD Kota Surabaya. Hal tersebut tentunya tidak luput dari kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya yang akuntabel, dimana pewujudan akuntabilitas instansi pemerintah Kota Surabaya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan.

KETERBATASAN PENULIS

Penulis mengalami kesulitan dalam segi pencarian referensi yang berskala internasional, baik dalam pencarian artikel, e-book, maupun sumber-sumber lainnya. Referensi literatur yang dimiliki penulis pun tidak banyak sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan terkait judul artikel sangat terbatas. Selain itu dengan tidak terjunnya langsung ke lapangan yang mungkin salah satunya dapat dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, penulis tidak dapat mengetahui secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi terkait dengan sistem akuntansi pemerintah dan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kota Surabaya.

PENULISAN UNTUK MASA DEPAN

Penulis berharap adanya tambahan kajian mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah namun dengan metode, kajian, lingkup penulisan, lingkup penelitian, dan wilayah teritorial yang berbeda guna memperkaya pengetahuan mengenai topik yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Parananda, Bagas H. 2016. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, Dan Lama Masa Kerja Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1): 47-59
- Wahyuni, E. S dan Rosmida. 2016. Analisis Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis) . *Jurnal Inovasi Bisnis*, 4(2).
- Darwis dan Sephi Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI*, 6(2): 150-174.
- Oktaviani, Matilde Agnes dan Dian Purnama Sari. 2020. Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1): 186-193.
- Nofianti, Leny dan Novie S. S. 2014. Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability. *Procedia: Social And Behavioral Sciences*. 164: 98 – 105.
- Said, Jamaliah dan Nur H. B. J. 2014. Accountability in government linked companies: an empirical finding. *Procedia: Social And Behavioral Sciences*. 145: 294 – 299.
- Antoniades, Nicos dan Perry H. 2019. Government capabilities as drivers of performance: path to prosperity. *Heliyon*. 5
- Nurislaminingsih, Rizki dkk. 2020. Pustakawan Referensi Sebagai Knowledge Worker. *Jurnal ANUVA*, 4(2) : 169-182.
- Manossoh, Hendrik. 2015. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Yusniar, Darwanis dan Syukriy A. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* Dan Dampaknya Pada Kualitas

- Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2).
- Prasetio, Januar Eko. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1):19-33
- Imawan, Amrizal dkk. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 10(1):156-175
- Rintiani, Wasik Nista. 2014. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. 3(1): 1-25
- Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kemenkeu Learning Center. Diakses pada 28 Desember, 2020, dari <https://klc.kemenkeu.go.id/puspsdm-fungsi-akuntabilitas-publik/>